

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Negara Maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau dan berada dalam kawasan atau teritorial laut yang sangat luas serta banyak dikelilingi oleh laut dan perairan. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan. Arti maritim itu sendiri adalah wilayah laut. Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu *maritime*, yang berarti navigasi, dari kata ini kemudian lahir istilah *maritime power* yaitu negara dengan kekuatan maritim atau negara dengan kekuatan yang berbasis di laut. Masih dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut adalah *seapower*. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

Dari istilah *seapower* tadi, istilah maritim seringkali mengandung unsur suatu hal yang memiliki arti ganda. Terdapat dua versi untuk pengertian ini, maritim dalam pengertian sempit yang hanya berhubungan dengan pengaruh dan laut (angkatan laut) atau maritim dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan dan berkenaan dengan laut atau lebih sering disinggung dengan istilah kelautan. Konsep negara maritim adalah sebuah konsep yang mengedepankan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan mensejahterahkan sebuah negara. pengertian lain dari kemaritiman adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu pada pelayaran, pengangkutan laut, perdagangan, navigasi, keselamatan pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, wisata laut, kepelabuhanan baik nasional maupun internasional, industri dan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. (pengertianmenurutparaahli.com : 2016)

Skala tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia dengan panjang 5,200 (lima ribu dua ratus) km, sangat besar. Terdapat dari kurang lebih 17,000 (tujuh belas ribu) pulau, Indonesia memiliki perbatasan dengan Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Singapura, Malaysia dan Filipina, dan China. Perbatasan laut yang

sedemikian luas, ditambah dengan sumber daya yang terbatas menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatannya dan menangani sejumlah isu terkait dengan perdagangan manusia dan penyelundupan orang, pembajakan dan perdagangan obat terlarang (indonesia.iom.int : 2015). Oleh karena itu indonesia harus memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Keamanan berasal dari kata pokok aman yang berarti bebas, terlindung dari segala bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan keamanan memiliki arti suasana yang aman, ketenteraman, ketenangan. Pengertian keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun Pshikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya_harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya Keamanan dapat dimaknai sebagai kondisi maupun sebagai fungsi. Sebagai fungsi, Keamanan Nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia disamping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang terkandung di dalamnya akan bervariasi tergantung kepada persepsi dan kepentingan. (Kanisius, 2005)

Samudera Hindia merupakan Samudera terbesar ketiga di dunia setelah Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Samudera Hindia secara geologis merupakan laut termuda, dimana Samudera Hindia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara Atlantik pada satu sisi dan Samudera Pasifik pada sisi lainnya. Garis pantai yang dimiliki oleh samudera ini adalah sepanjang 66.526 (enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam) km. Kedalaman rata-rata yang dimiliki oleh Samudera Hindia ini adalah 3.890 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh) m, dimana titik terdalam di Samudera ini adalah Pulau Jawa yang memiliki kedalaman sekitar 7.725 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima) m. Samudera Hindia ini mempunyai volume air yang diperkirakan sebanyak 292.131.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu) km². Samudera Hindia dipisahkan dengan Samudera Atlantik oleh 20' garis bujur timur, dan dengan Samudera Pasifik oleh 147' garis bujur timur. ada beberapa negara yang berada di

wilayah samudera ini, antara lain adalah Madagaskar, Komoro, Maldives, Sri Lanka, Mauritius, dan Seychelles.(ilmugeografi.com : 2016)

Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Biasanya konflik muncul akibat tidak adanya rasa toleransi dan saling mengerti kebutuhan masing-masing individu. Konflik adalah sebuah keadaan dimana antara pihak yang bermasalah tidak mencapai tujuan dan kesepakatan yang ada, sehingga hal ini bisa mencampuri urusan masing-masing pihak. Secara singkat dapat dikatakan konflik adalah sebuah proses dimana ada keadaan yang terus berubah dan ada banyak kepentingan yang butuh penyelesaian, sehingga bisa menyamakan persepsi agar tidak adanya masalah atau konflik yang berat maupun berkelanjutan yang bisa merusak hubungan kedua belah pihak.

Potensi konflik antar negara dan ancaman dari pihak luar masih cukup besar di kawasan yang dihuni negara-negara Asia dan Afrika ini. Ancaman konflik terhadap negara-negara di kawasan Samudra Hindia ini dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari konflik sektarian, perebutan sumber daya alam, terorisme, geopolitik kawasan, hingga ancaman perompakan yang terjadi setiap tahunnya. Ancaman merupakan salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui segala tindak kriminal dan politis. Ancaman ini sendiri merupakan ancaman yang bisa saja menggunakan kekuatan yang bersenjata terorganisasi dan dinilai memiliki kemampuan yang berbahaya terhadap kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah suatu negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kesenjangan sosial dan ekonomi antar negara dilingkar Samudra Hindia amat sangat memunculkan hambatan perdagangan seperti adanya perompakan. Kesenjangan sosial adalah sebuah gejala yang timbul dalam masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan yang lainnya di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Salah satu bentuk contoh kesenjangan sosial yang bisa dilihat dan banyak terjadi di sekitar kita adalah kesenjangan yang terjadi di antara masyarakat yang tinggal di dalam sebuah kompleks perumahan mewah dengan masyarakat yang tinggal di luar atau

sekitar kompleks perumahan mewah tersebut. Di mana dalam kondisi seperti itu kita dengan sangat jelas dapat melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kedua kelompok masyarakat tersebut, yang pada kenyataannya tinggal sangat berdekatan antara satu dengan lainnya.

Kesenjangan sosial bukanlah sebuah permasalahan yang bisa diatasi dengan mudah, di mana hal ini menyangkut keberadaan banyak orang dan komunitas yang terlibat di sana. Perompakan sering terjadi karena adanya kesenjangan sosial ini. Perompakan adalah sebuah tindakan pelanggaran hukum dengan kekerasan atau pengambilalihan harta benda yang terjadi di perairan yang berdampak pada kerugian ekonomi negara-negara yang mencapai US\$ 18 miliar atau setara dengan Rp 171 triliun, salah satunya berupa kerugian pada jalur logistik perusahaan dimana kapal muatan harus memutar sehingga membuat biaya tambahan bahan bakar dan biaya petugas keamanan tambahan serta asuransi kapal yang semakin tinggi. (finance.detik.com : diakses pada 26 Oktober 2017)

Naiknya angka perompakan yang terjadi di samudra hindia ini tentunya sangat mendorong adanya pertemuan-pertemuan regional bagi negara-negara yang bersangkutan sehingga pada tahun 1994 Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela menginisiasi penciptaan suatu platform kerjasama sosial-ekonomi dan upaya damai lainnya untuk negara-negara lingkaran Samudera Hindia. Karakteristik Samudera Hindia memang masih menyisakan banyak persoalan, terutama dalam hal keamanan regional. Lembaga-lembaga internasional telah menjadi fenomena kehidupan internasional yang semakin umum. Perkembangan pesat organisasi internasional, tumbuhnya bentuk-bentuk perjanjian antar negara, dan mendalamnya upaya integrasi regional di Eropa, semuanya merupakan representasi formal dari sejauh mana politik internasional menjadi semakin terlembagakan. (Carlsnaes, Risse, & Simmon, 2004).

Dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah disebutkan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menciptakan suatu organisasi internasional dengan syarat tidak melanggar prinsip-prinsip PBB pada umumnya (unic.un.org). Organisasi regional dibentuk dalam rangka kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Akan tetapi satu hal yang sudah pasti mengenai organisasi regional ini dapat terbentuk karena faktor geografi, dimana setiap negara-negara

anggota berada pada suatu kawasan yang telah disepakati. Dalam dunia internasional saat ini keberadaan organisasi regional sangat penting. Hal ini dikarenakan ketika negara ingin menyelesaikan masalah internalnya, negara tersebut tidak perlu membawanya ke mahkamah internasional, melainkan terlebih dahulu ada baiknya dimusyawarahkan di dalam forum organisasi regional. Yang dimaksud organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional mempunyai wilayah kegiatannya bersifat regional (kawasan), dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja.

Dengan kata lain Organisasi internasional adalah suatu bentuk organisasi dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yg juga merupakan isi dari perjanjian atau charter.

Meski demikian, kiranya perlu pula digarisbawahi bahwa walau tidak terdapat definisi tentang keamanan maritim di tataran internasional, terdapat kesepakatan tentang beberapa komponen ancaman yang dianggap membahayakan “keamanan maritim” tersebut. keamanan maritim dikaitkan dengan penanganan terhadap tiga isu ancaman yaitu tindakan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai (*terrorist acts against shipping and offshore installations*), pembajakan dan perampokan bersenjata (*piracy and armed robbery against ships*), lalu lintas obat terlarang dan narkotik yang ilegal dan zat-zat psikotropik (*illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances*).

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea /UNCLOS 1982*) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan undang-undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Ridwan Lasabuda : 2013).

Samudera Hindia merupakan contoh lautan yang memiliki sumber daya alam yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi indonesia maupun negara-negara dari tiga benua, yaitu Asia, Australia dan Afrika dengan luas

mencapai 73,3 juta km². Akan tetapi Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, keberadaan Samudra Hindia sangat strategis. Pengertian strategis adalah suatu hal yang mempunyai dampak atau pengaruh yang menguntungkan terhadap suatu tujuan tertentu secara jangka panjang. Beberapa nilai strategis diantaranya menjadikan Samudra Hindia sebagai salah satu jalur tersibuk untuk perdagangan dunia, sekitar 50% kapal dagang, 34% lalu lintas kargo, dan 67% pengiriman minyak dunia melewati Samudra Hindia. Selain itu, 55% cadangan minyak bumi dan 40% gas berada di kawasan ini. (poskotanews.com : 2015)

Mengamankan kawasan Samudra Hindia dan memastikan stabilitas jalur pelayaran dan negara-negara pesisirnya merupakan kunci bagi masa depan kawasan ini. Proyeksi keamanan di kawasan Samudra Hindia menjadi semakin penting bagi stabilitas dan kesejahteraan global karena kawasan ini merupakan persimpangan penting dan luas dari rivalitas geostrategis, ambisi ekonomi, kompetisi sumber daya, manajemen lingkungan, tantangan pembangunan, dan perubahan demografi. Perdagangan, persaingan mendapatkan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas, dan aktivitas angkatan laut akan terus mengalami peningkatan. Negara-negara di kawasan tersebut berupaya untuk mendorong kerja sama regional, mengidentifikasi keamanan laut, sengketa wilayah, bencana alam, dan peningkatan persaingan antara India dan Tiongkok sebagai tantangan keamanan utama di kawasan tersebut. Akan tetapi keamanan laut tetap menjadi tantangan terbesar seperti Perompakan, jalur perdagangan narkoba, maupun perebutan pengaruh kekuasaan karena Samudra Hindia berperan penting dalam menjembatani Timur dan Barat, dan jalur pelayarannya yang kini melebar hingga Samudra Pasifik. Hal ini membantu mendorong perdagangan global dan ekonomi dunia. Kawasan Samudra Hindia ini berada di tengah-tengah peralihan hubungan ekonomi dan geostrategis yang tengah berlangsung di dunia. Kawasan ini kini terkait erat dengan Pasifik Barat melalui hubungan mendalam dan saling ketergantungan baik dalam ketahanan energi, proliferasi nuklir, perdagangan dan pasar, atau melalui pertumbuhan ekonomi dan keamanan laut

Indonesia tentu wajib membangun pertahanan maritim termasuk menjaga keselamatan pelayaran dan maritim. Selain itu komitmen mendorong perkembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan pembangunan laut,

logistik, dan perkapalan juga salah satu pilar untuk meningkatkan keamanan maritim di Samudera Hindia. Di dalam kawasan ini dianggap Indonesia sebagai suatu lingkungan yang kondusif dan strategis untuk Indonesia dapat melakukan pelaksanaan agenda politik luar negerinya. (bisnis.liputan6.com : diakses pada 27 Oktober 2017)

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas serta ancaman keamanan di kawasan tersebut di karenakan kecilnya tingkat keamanan di kawasan Samudera Hindia, maka dari itu penulis ingin merumuskan masalah yang di kaji sebagai berikut:

Bagaimana peran Indonesia dalam meningkatkan keamanan Maritim di Samudera Hindia periode 2015 - 2017 ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kondisi keamanan maritim di Samudera Hindia
- b. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya penurunan keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia
- c. Untuk menganalisa peran indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim di Samudera Hindia

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat untuk masyarakat dalam kajian ilmiah maupun akademis. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapainformasi mengenai keamanan Maritim di Samudera Hindia.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusidalam pengembangan Ilmu Hubugnans Internasional mengenai masalah keamanan maritim serta peran indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia.

I.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, dalam jurnal yang ditulis oleh Rizki Roza dalam *Vol. VII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015* dengan judul “*Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Kepentingan Indonesia di Samudera Hindia*”, berisikan tentang pemerintahan Jokowi yang ingin memperluas keterlibatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dengan cara mengintegrasikan dua samudera sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar negeri dan mendorong kerjasama komprehensif maritim di kawasan, terutama melalui IORA (*Indian Ocean Rim Association*). Hal ini dapat disimpulkan menjadi perubahan yang signifikan bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang sebelumnya sangat menekankan sentralitas ASEAN. Selain itu, pada prioritas pengelolaan perikanan IORA. Negara-negara pesisir Samudera Hindia memiliki kepentingan yang sama dalam mengelola dan konservasi sumber daya perikanan yang terkandung di kawasan tersebut. Dampak dari penangkapan ikan secara berlebihan dan perubahan iklim telah menyebabkan merosotnya cadangan ikan di kawasan ini, oleh karena itu untuk menghadapi persoalan ini dan mengelola perikanan di kawasan, IORA telah membentuk *Fisheries Support Unit (FSU)*.

Dalam keterangan yang telah ditulis oleh Rizki Roza selaku penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian penulis berbeda dengan jurnal tersebut karena penelitian penulis lebih memfokuskan ke arah keamanan Maritim di Samudera Hindia. Sedangkan, jurnal tersebut lebih berisikan tentang memahami tujuan dan kepentingan Indonesia di Samudra Hindia dalam konservasi sumber daya perikanan yang terkandung di kawasan tersebut.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Dhita Anggraini Ayuningtyas *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 5, 2018: 001-014* mahasiswa program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman dengan judul “*Kepentingan Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) tahun 2015*”, berisikan tentang peningkatan sektor ekonomi di Samudera Hindia yang bisa kita sebut juga sebagai *blue economy*. Di sini dijelaskan bahwa ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan sumber dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua

kontributor dalam suatu sistem. Ekonomi biru juga kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir. Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan, yang biasa dikenal dengan Small Island Development States (SIDS). Ekonomi biru dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerah pesisir, dan adaptasi perubahan iklim.

Jurnal yang ditulis oleh Dhita Anggraini Ayuningtyas dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 5, 2018: 001-014* ini dibuat untuk lebih memahami tujuan dan kepentingan Indonesia di Samudra Hindia tentang *Blue Economy* atau peningkatan ekonomi di Samudera Hindia dengan cara inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Sedangkan, penelitian penulis lebih memfokuskan kepada peran Indonesia dalam meningkatkan keamanan Maritim di Samudera Hindia.

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman dalam *Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 Vol. 1, No. 2, Oktober 2016: 175 - 182* dengan judul "*Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia*", berisikan tentang Kondisi alamiah geografis Indonesia yang dikategorikan sebagai maritim seharusnya menjadi nilai tambah bagi diplomasi Indonesia terutama untuk kepentingan pembangunan Indonesia. Sehingga secara geokultur, seharusnya Diplomasi Maritim menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan keamanan maritim di Indonesia termasuk penggunaan diplomasi maritim dalam merespon terhadap gangguan keamanan, sehingga secara berangsur kapabilitas pertahanan akan terbangun. Artikel ini akan mengulas pentingnya menata sektor maritim Indonesia pada visi *Global Maritime Fulcrum* (GMF) dengan melihat kekuatan dan kelemahan kapabilitas TNI AL (tentara nasional indonesia angkatan laut) sebagai salah satu instrumen diplomasi Maritim menuju pembangunan keamanan maritime Indonesia. Artikel ini juga berargumen bahwasanya hal terpenting yang perlu

menjadi prioritas Diplomasi Maritim Indonesia adalah mampu menjamin keamanan maritim bagi kawasan regional dan global.

Dalam jurnal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman. Jurnal ini berisikan tentang mengulas pentingnya penataan sektor maritim Indonesia pada visi *Global Maritime Fulcrum* (GMF) serta diplomasi di kawasan regional dan global. Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada keamanan maritim di Samudera Hindia seperti konflik atau ancaman situasi kawasan.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Kerjasama Internasional

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda, demikian pula dengan kemampuan dan juga potensi yang dimiliki tiap negara berbeda. Hal tersebut menyebabkan suatu negara kemudian membutuhkan kemampuan dari negara lain yang tidak dimiliki di negaranya. Keberadaan kerjasama internasional menjadi penting adanya karena manfaatnya dapat dimaksimalkan untuk menumbuhkan rasa persahabatan dan pengertian antar negara satu dan lainnya.

Menurut K. J. Holsti, kerjasama internasional dapat menimbulkan satu citra akan suatu organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah biasa, atau ahli-ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain meningkatkan produktivitasnya. Kerjasama juga dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, usaha-usaha kerjasama lain dijalankan dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional. Perumusan kebijakan umum atau koordinasi kebijakan nasional yang terpisah dilakukan atas dasar multilateral, dan sering mencakup rencana dan usul-usul yang tidak dikonsepsikan oleh pemerintah nasional tetapi oleh pejabat sipil internasional. Jumlah lembaga multinasional yang dirancang untuk mengembangkan tujuan ekonomi, teknik, atau diplomatic-militer atau mengurus masalah bersama telah tumbuh pesat mulai dari tidak sampai sepuluh pada tahun 1870 menjadi lebih dari 270 pada tahun 1982. Walaupun banyak peraturan sangat lemah dan sering tidak efektif, pemerintah

telah dipaksa menggunakan makin banyak waktu untuk merundingkannya guna mencegah situasi yang merupakan bencana besar yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi dan teknologi yang maju pesat. Dengan demikian, konferensi multilateral yang besar dan berlangsung lama menjadi forum yang semakin nyata untuk kerjasama internasional (Holsti, 1983:209).

Berbagai masalah baik nasional, regional maupun global saling bermunculan yang memerlukan perhatian dari berbagai Negara dan telah merupakan kecenderungan yang kuat dewasa ini. Banyak kasus memperlihatkan bahwa pemerintah saling melakukan hubungan, mengadakan perundingan untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dan biasanya perundingan diakhiri dengan membentuk perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses semacam itu membentuk apa yang disebut dengan kerjasama (*cooperation*). Dalam kerjasama ada sasaran-sasaran yang hendak dicapai. (R. Soeprapto, 1997:167)

Menurut Koesnadi Kartasmita (1997: 20), pengertian kerjasama internasional adalah “Kerjasama dalam masyarakat internasional suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding serta mempunyai arah tujuan sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.

Teori kerjasama internasional ini dibutuhkan dalam keterkaitan “peran Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim di Samudera Hindia” karena dapat di simpulkan bahwa berbagai masalah baik nasional, regional maupun global saling bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai Negara. Banyak kasus memperlihatkan bahwa pemerintah saling melakukan hubungan serta mengadakan perundingan untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dan biasanya perundingan itu sendiri diakhiri dengan membentuk perjanjian yang saling memuaskan bagi semua pihak. Proses semacam itu membentuk apa yang disebut dengan kerjasama (*cooperation*). teori ini akan penulis gunakan untuk lebih menjelaskan fungsi kerjasama internasional yang

dilakukan Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Samudera Hindia dalam meningkatkan keamanan maritim akan memberikan dampak yang positif dalam menstabilkan kawasan tersebut dari ancaman keamanan.

I.6.2 Teori Peran

Peran dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan hal tersebut sang pelaku peran, baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peran menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur sosial. Peran sendiri merupakan seperangkat perilaku yang dapat terwujud sebagai perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan. Baik perilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur (Kantaprawira, 1987:32).

Menurut Mochtar Mas'ood (1989 : 44), mengatakan suatu arti dari peran (role) adalah sebagai berikut : “Perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi”. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut”.

Dalam penjelasan teori peran ini dapat disimpulkan bahwa teori peran sangatlah dibutuhkan dalam keterkaitan “Peran Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim di Samudera Hindia”, karena peran bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan (individu maupun kelompok) terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Teori peran ini akan penulis gunakan untuk membantu dalam hal menganalisis peran Indonesia terhadap dalam menanggulangi ancaman keamanan yang terjadi di kawasan Samudera Hindia.

I.6.3 Konsep Keamanan Maritim

Keamanan Maritim / Maritime Security ialah konsep yang menjadi populer dalam dekade terakhir. Negara-negara dan organisasi internasional mulai menyusun mandat dan merancang / menyesuaikan kembali

kebijakan-kebijakannya sesuai dengan interpretasi istilah Keamanan Maritim. Konsep Keamanan Maritim menjadi mengemuka pasca serangan teroris tanggal 11 September 2001 di New York Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS menyusun Maritime Security Policy di tahun 2004 saat menyebarnya ketakutan global akan terorisme maritim (New York merupakan kota di tepi laut). Populernya konsep Keamanan Maritim juga didorong oleh meningkatnya perompakan / piracy di lepas pantai Somalia antara tahun 2008-2011. Meningkatnya perompakan di Sea Lanes of Communication (SLOC) internasional berpotensi menghambat / mengganggu kelancaran perdagangan internasional yang pasokannya 90% dikirimkan melalui laut. Kepopuleran konsep Keamanan Maritim didorong pula dengan ketegangan di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) / South China Sea dan East China Sea. Negara-negara di sekitar laut tersebut mulai membangun kemampuan Angkatan Laut untuk mempertahankan klaim wilayah masing-masing sehingga timbul kekuatiran-kekuatiran akan keamanan penggunaan SLOC di kedua wilayah lautan tersebut.

Konsep Keamanan Maritim juga dapat dijelaskan dari ancaman-ancaman yang dihadapi, sebagai contoh ialah Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 tentang Oceans and the Law of the Sea membedakan 7 (tujuh) jenis ancaman:

1. Piracy and armed robbery (Perompakan dan perampokan bersenjata)
2. Terrorist acts (Tindakan-tindakan terorisme)
3. Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction (penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal)
4. Illicit trafficking in narcotics (penyelundupan obat-obatan terlarang)
5. Smuggling and trafficking of persons by sea (penyelundupan dan perdagangan manusia lewat laut)
6. IUU Fishing (usaha perikanan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan);
7. Intentional and unlawful damage to the marine environment (pengerusakan terhadap lingkungan laut yang disengaja)

Uni Eropa memiliki daftar yang sama dan menambahkan:

1. Territorial maritime disputes, acts of aggression and armed conflicts between states (sengketa wilayah maritim, tindakan-tindakan agresi dan konflik bersenjata antar negara)
2. Potential impacts of natural disasters, extreme events and climate change on maritime transport system and in particular on maritime infrastructure (potensi dampak bencana alam, cuaca ekstrim dan perubahan iklim terhadap sistem transportasi maritim dan infrastruktur maritim)
3. Conditions at sea and in the coastal zone that weaken the potential for growth and jobs in the marine and maritime sectors (kondisi di laut dan pantai yang melemahkan potensi perkembangan dan pekerjaan di sektor kelautan dan kemaritiman)
4. Cyber attacks against shipping or maritime infrastructures (serangan siber terhadap perkapalan dan infrastruktur maritim).

Pengertian tradisional terhadap konsep Keamanan Maritim ialah pertahanan atau perlindungan terhadap negara yang menjelaskan dan mengatur peran dan strategi Angkatan Laut (*Seapower*). Pada masa damai, fungsi Angkatan Laut salah satunya ialah mengamankan *Sea Lane Of Communication* (SLOC) melalui tindak pencegahan, pengawasan dan pengejaran atau interdiction untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Terkait dengan konsep Keamanan Maritim ialah konsep Keselamatan Maritim (*Maritime Safety*) yang mengatasi permasalahan keselamatan kapal, instalasi, personil maupun aktor profesional di bidang kemaritiman dan lingkungan laut. Organisasi internasional yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ini ialah *International Maritime Organization* (IMO) di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Keselamatan Maritim mencakup standar pengaturan pembangunan, konstruksi kapal dan instalasi maritim, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, kepatuhan prosedur-prosedur keselamatan,

pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan di bidang Keselamatan Maritim.

Dalam perkembangannya Keamanan Maritim juga dikaitkan dengan *Human Security*. *Human Security* ialah proposal *United Nations Development Program* (UNDP) yang menitikberatkan konsep keamanan kepada kebutuhan masyarakat dan bukan negara. Inti *Human Security* UNDP ialah *food, shelter, sustainable livelihoods dan save employment* (makanan, tempat tinggal, mata pencaharian yang berkelanjutan dan simpan pekerjaan). Keamanan Maritim merupakan tantangan bagi kegiatan terkoordinasi antar institusi di suatu negara. Semakin luas definisi Keamanan Maritim semakin luas aktor maupun institusi yang terlibat. Hal ini termasuk koordinasi sipil-militer karena kegiatan-kegiatan terkait Keamanan Maritim sulit dipisahkan antara kegiatan sipil dan operasi militer. Kegiatan-kegiatan Keamanan Maritim pasti akan melibatkan institusi-institusi regulator seperti Kementerian Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Perdagangan, Penjaga Pantai, Otoritas Pelabuhan, Penjaga Perbatasan, Polisi dan Institusi Intelijen.

aspirasi terhadap maritim kini tidak hanya yang bersifat tradisional seperti keinginan untuk melakukan pengendalian (*sea control*) dan pengiriman ekspedisi operasi militer jangka pendek (*expeditionary operations*). Di luar dua aspirasi ini, terdapat juga keinginan untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai pemeliharaan tatanan di perairan laut (*maintaining good order at sea*) karena laut kini tidak hanya sebagai wilayah untuk mengamabarkan wilayah daratan tetapi juga sebagai sumber daya alam, media transportasi dan sebagai suatu aspek yang penting dari lingkungan hidup. keamanan maritim yang disatukan dengan istilah keselamatan maritim (*maritime security and safety*) memiliki keterkaitan lebih jauh menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan maritim harus diberikan prioritas yang tinggi dan bahwa berbagai tipe kejahatan yang terjadi di laut seperti serangan teroris, pembajakan, penyeludupan migran, illegal traffic dalam obat-obat narkotik dapat menjadi ancaman serius terhadap penggunaan laut secara damai.

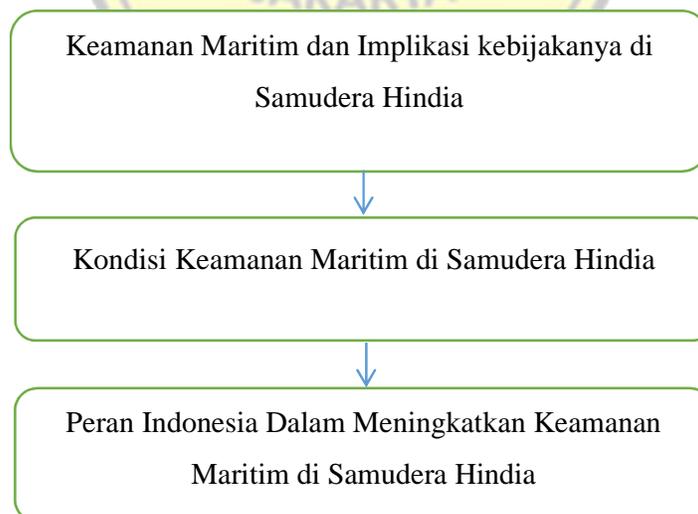
wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi global, sehingga menjadikan keamanan maritim isu krusial bagi banyak negara di dunia. Stabilitas keamanan maritim sangat diperlukan seluruh negara di dunia dalam rangka menjaga kepentingan nasional bangsa yang berdampak pada pembangunan nasional. (Susanto dan Munaf, 2014: 48- 50)

Keamanan maritim merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, sehingga praktek keamanan nasional suatu negara menentukan bagaimana praktek keamanan maritim dalam kebijakan nasional. (Octavian & Yulianto, 2014: 159-160)

Menurut Makmur Keliat (2009: 118), kendati dewasa ini masalah keamanan maritim sedang diperbincangkan banyak pihak, belum ada satupun pihak yang mencetuskan definisi utuh dari keamanan maritim karena masalah ini dinilai terlalu sensitif khususnya dalam hal batas laut suatu negara.

Dalam hal ini, konsep keamanan maritim dapat penulis gunakan untuk membantu memperkuat peran Indonesia dalam menganalisis dinamika penurunan penguatan keamanan maritim di wilayah Samudera Hindia yang rentan akan terjadinya konflik keamanan. Selain itu, konsep keamanan maritim juga di gunakan sebagai tujuan utama Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

- a) Tingkat keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia masih terbilang sangat rendah karena banyaknya ancaman keamanan yang terjadi seperti perompakan, *illegas fishing*, peredaran narkoba..
- b) Konflik di kawasan Samudera Hindia di pengaruhi beberapa faktor, yaitu perebutan sumberdaya alam, terorisme, geopolitik kawasan, hingga ancaman perompakan.
- c) Naiknya angka perompakan yang terjadi di kawasan Samudera Hindia dikarenakan Kesenjangan sosial dan ekonomi antar negara di lingkaran Samudera Hindia.
- d) Indonesia memiliki kepentingan di kawasan Samudera Hindia untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan tersebut karena wilayah tersebut merupakan kawasan yang kondusif dan strategis untuk Indonesia dapat melakukan pelaksanaan agenda politik luar negerinya.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Pendekatan penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang digunakan dalam tulisan ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini penulisan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan pada rumusan masalah yang dipakai oleh penulis, Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran Indonesia dalam meningkatkan keamanan Maritim di Samudera Hindia.

I.9.2 Sumber dan jenis data

Sumber data primer diinput dengan memperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen resmi di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu wawancara dengan para ahli yang terkait dengan penelitian ini serta narasumber pihak lembaga yang menaungi keamanan Maritim. Untuk mendukung pengolahan data utama maka penulis juga mengupayakan berbagai referensi data-data sekunder seperti bahan bacaan dari jurnal, laporan tertulis, surat kabar,

majalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Sumber referensi data juga di peroleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan judul penelitian seperti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia maupun Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Penggambaran dari masalah yang diteliti sangat bergantung dari validitas data yang akan diinput, karena jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif maka penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk telaah pustaka (library research). Teknik dokumentasi kemudian digunakan untuk penelusuran berbagai dokumen tertulis. Teknik wawancara juga menjadi salah satu bentuk pengumpulan data dengan terjun langsung ke lembaga atau instansi yang terkait dalam rumusan masalah dan juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang kredibel dan punya pengetahuan lebih tentang obyek permasalahan yang sedang diteliti.

I.10 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas tentang pemahaman terhadap skripsi ini penulis akan membagginya berdasarkan sistematika berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai kondisi keamanan Maritim di Samudera Hindia dan kaitannya dengan Indonesia secara umum. Selain itu, bab ini berisikan sub-bab lainnya seperti rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kondisi keamanan maritim di Samudera Hindia

Bab ini menjelaskan tentang situasi keamanan maritim di Samudera Hindia yang cenderung menurun akibat aksi

perompakan, serta menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi di Samudera Hindia.

BAB III Peran Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim di Samudera Hindia

Bab ini membahas tentang peranan Indonesia dalam meningkatkan keamanan Maritim di kawasan Samudera Hindia, serta menganalisis kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai peran Indonesia dalam meningkatkan keamanan Maritim di Samudera Hindia. Selain itu, penulis akan memberikan keseluruhan pokok pembahasan agar dapat menjawab dan memenuhi tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

